

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, Suharsimi., 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashiddiqie, Jimly., 2004, *Cetak Biru Membangun Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang adil dan terpercaya*, Jakarta: NKRI.
- Asshiddiqie, Jimly., 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhary, 1992, *Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Budiardjo, Miriam., 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Cetakan Pertama*, Jakarta, Gramedia.
- Charles de Secondat Montesquieu et al., 1989. *The Spirit of the Laws, Cambridge Texts in the History of Political Thought*. Cambridge; New York, Cambridge University Press.
- Febriansyah, Reza Fikri., 2016, *Realita, Kendala, Dan Cita-Cita Dalam Seleksi Hakim Konstitusi*, dalam Feri Amsari, 2016, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Haryono, Dodi., 2016, *Seleksi Hakim Konstitusi yang Transparan, Partisipatif, Objektif, dan Akuntabel*, dalam Feri Amsari, 2016, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers,

- Ibrahim, Johnny., 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.  
Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Indrati, Maria Farida., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Yogyakarta, Kanisius.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta,  
Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas  
Hukum UI.
- Kusnardi, dan Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:  
PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.
- Kusumohamidjojo, B., 2004, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil*.  
Jakarta: Grasindo.
- Lotulung, Paulus Effendi., 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*,  
Jakarta: Selemba Hunamika.
- Manan, Bagir., 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat  
Penerbitan, Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta:  
kanisius.
- Marius, Eduardus., 2019. *“Teori Negara Hukum & Kedaulatan Rakyat”*, Malang:  
Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2018, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-  
11*, Jakarta: Pranada Media Group.
- Pratama, Fachrizza Sidi., 2021, *Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa  
Perpanjang Paspor Menjadi 10 Tahun*, Depok, JLBP, Politeknik Imigrasi,

- Puspitadewi, Rachmani., 2016, *Parrhesia Pada Seleksi Hakim Konstitusi*, dalam Feri Amsari, 2016, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Siahaan, Maruarar., 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simamora, Janpatar., 2013, “*Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Riview di Indonesia, Cetakan Pertama*”, Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Sirajuddin & Winardi, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soeroso, Fajar Laksono., 2016, *Mekanisme Pencalonan Hakim Konstitusi yang Berwibawa dan Bermartabat*, dalam Feri Amsari, 2016, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Strong, C.F., 2011, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung, Nusa Media,
- Sutiyoso, Bambang., Hastuti, Sri., Puspitasari, 2005, *Aspek – Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres.
- Thohari, Ashin., 2004. *Komisi yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta, ELSAM.
- Tutik, Titik Triwulan., 2012, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Tutik, Titik Triwulan., 2017, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok. Prenadamedia Group.
- Wajdi, Farid., Imran., Hasanuddin, Ilham., 2020, “*Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*,” *Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yuswalina, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Malang: Setara Press.

## JURNAL

Airlangga, Shandi Patria, "*Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis*,"

Jurnal Cepalo, Vol. 3, Nomor 1 Januari-Juni 2009.

Hamzani, Achmad Irwan, "*Mengagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang*

*Membahagiakan Rakyatnya*," Jurnal Yustisia, Edisi 90, September-Desember 2014.

Hardianto, Danang., 2014, *Hakim Konstitusi adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah*

*Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Kenneth C. Wheare, 1971., *Modern Constitutions*, 2. ed. Oxford Paperbacks

University Series 11. London u.a: Oxford University.

Mitendra, Hario Mahar., 2018, *Fenomena Dalam Kekosongan Hukum*, jurnal

RechtsVinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Palguna, I.D.G., 2018, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan*

*Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta.

Ridho, Mohammad Faisal, "*Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi*

*Indonesia*," Jurnal ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 1, Nomor 8e, 2017.

Rishan, Idul, "*Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim*

*diIndonesia*", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23, Nomor 2 April 2016.

Tutik, Triwulan., 2012, "*Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut UUD RI 1945,*" Jurnal Dinamika Hukum vol. 12 no. 2, Surabaya.

Wijayanti, Winda., dan Quraini, Nuzul., 2014, *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi,* Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Keppres Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Presiden

Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020  
Tentang Tata Tertib

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020

Pengumuman Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Presiden  
Nomor: 01/PANSEL-MK/XI/2019 Tentang Pendaftaran Calon Hakim  
Konstitusi yang Diajukan oleh Presiden

Pengumuman Mahkamah Agung Nomor: 01/Pansel/CHMK/5/2023 Tentang  
Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi dari Unsur Mahkamah Agung RI  
Tahun Anggaran 2023.

#### **SKRIPSI DAN TESIS**

Ali, Haedar., Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dpr Terhadap  
Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh  
Siyasah, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember, 2023.

Fajri, Nurul., Hubungan Rekrutmen Hakim Konstitusi dengan Fungsi Mahkamah  
Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Indonesia, Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Andalas. 2013.

Febrinandez, Hemi Lavour., Independensi Hakim Konstitusi Dalam Memutus  
Perkara Di Mahkamah Konstitusi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Andalas Padang, 2018.

Wahyudin, Andi., Analisis Hukum Pengaturan Pemberhentian Hakim Mahkamah  
Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PPU-

XX/2020, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.

Wildan Ansori Nasution, Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Tesis Direktorat Progam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

#### **WEBSITE DAN SUMBER LAINYA**

Hidayat, Rofiq., Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Upaya Sistematis Mengendalikan Mahkamah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-hakim-konstitusi-aswanto-upaya-sistematis-mengendalikan-mahkamah-1t633bf7956c4ee?page=all>, diakses Pada Tanggal 03 April 2024.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-1t649255f7edb35/?page=1>, diakses pada 3 April 2024.

Indonesia At Melbourne, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/home-2/percobaan-political-recalling-untuk-menundukkan-cabang-kekuasaan-kehakiman-yang-merdeka/>, diakses pada 4 April 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode-etik>, di akses tanggal 2 April 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses Tanggal 4 April 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses Tanggal 4 April 2024.



Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/integritas>, diakses pada 5 April 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/negarawan>, diakses pada 5 April 2024.

Komisi III DPR RI, Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>, diakses pada 2 April 2024.

Komisi Yudisial, "*Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka Dari Berbagai Aspek*," 2020, [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/794/kekuasaan-kehakiman-harus-merdeka-dari-berbagai-aspek](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/794/kekuasaan-kehakiman-harus-merdeka-dari-berbagai-aspek), diakses pada 5 April 2024.

Mahkamah Agung, "Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2020, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 5 April 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Kedudukan Dan Kewenangan | 2020," <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, diakses pada 5 April 2024.

Nugraeny, Dian Erika, Jokowi Resmi Lantik Guntu Hamzah Pengganti Guntur Hamzah, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/09455801/Jokowi-resmi-lantik-guntur-hamzah-jadi-hakim-mk-pengganti-aswanto>, diakses pada 1 April 2024.

Qurani, Hamalatul., <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-alasanpemberhentian-hakim-dalam-uu-mahkamah-konstitusi-1t633a3a57a6505>Diakses Pada Tanggal 10 April 2024.

Wawancara Aswanto oleh Tim Harian Kompas, Pada tanggal 25 November 2022.

Diakses melalui <https://bit.ly/Wawancarabersama-ProfAswanto>, Di akses

Pada tanggal 4 April 2024.

Wicaksono, Adhi, Alasan DPR Copot Aswanto Dari Jabatan Hakim Konstitusi,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32->

[855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi), diakses

pada 2 April 2024.

Wignjoosobroto, Sutandyo, 2012, Negara Hukum dan Permasalahan Akses

Keadilan di Negeri – Negeri berkembang Pasca-Kolonial, Makalah

disampaikan pada Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum

Indonesia, Kemana akan melangkah, Jakarta, diakses pada 2 April 2024.

